



**Urgensi Kebijakan Pendanaan Lembaga  
Swadaya Masyarakat (LSM) untuk Demokrasi  
Indonesia yang Inklusif dan Berkelanjutan  
Selasa 17 Mei 2022**

**Kastorius Sinaga  
Staf Khusus Mendagri**

## DEFENISI

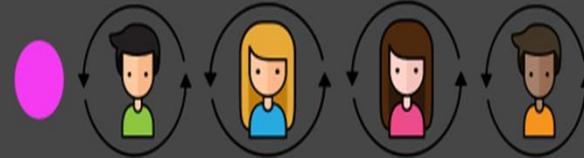
sesuai UU 16/2017 dan PMDN 58/2017

**ORGANISASI MASYARAKAT** TERMASUK  
*LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT*

**“DIDIRIKAN OLEH MASYARAKAT  
SECARA: SUKARELA, KESAMAAN  
ASPIRASI, KEHENDAK,  
KEBUTUHAN, KEPENTINGAN,  
KEGIATAN, DAN  
BERPARTISIPASI DALAM  
PEMBANGUNAN DEMI  
TERCAPAINYA TUJUAN NASIONAL  
BERDASARKAN PANCASILA DAN  
UUD 1945”**

## KETENTUAN UMUM

### PENDIRIAN



Didirikan oleh 3 orang WNI atau lebih

### KLASIFIKASI ORMAS

#### PENDAFTARAN



Ormas yang telah mendapat pengesahan badan hukum, tidak memerlukan SKT

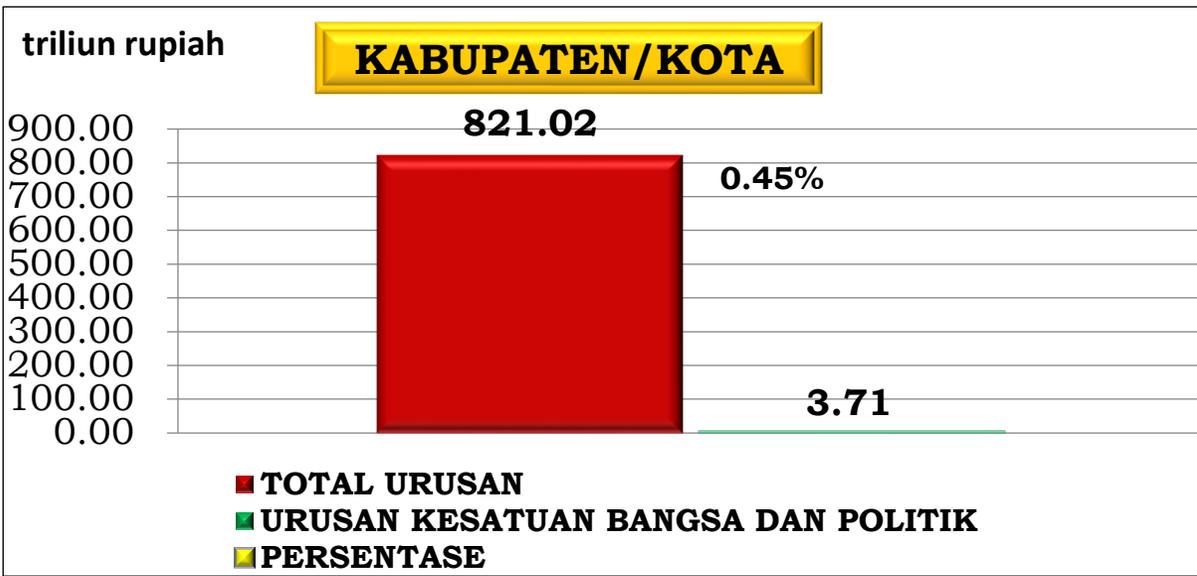
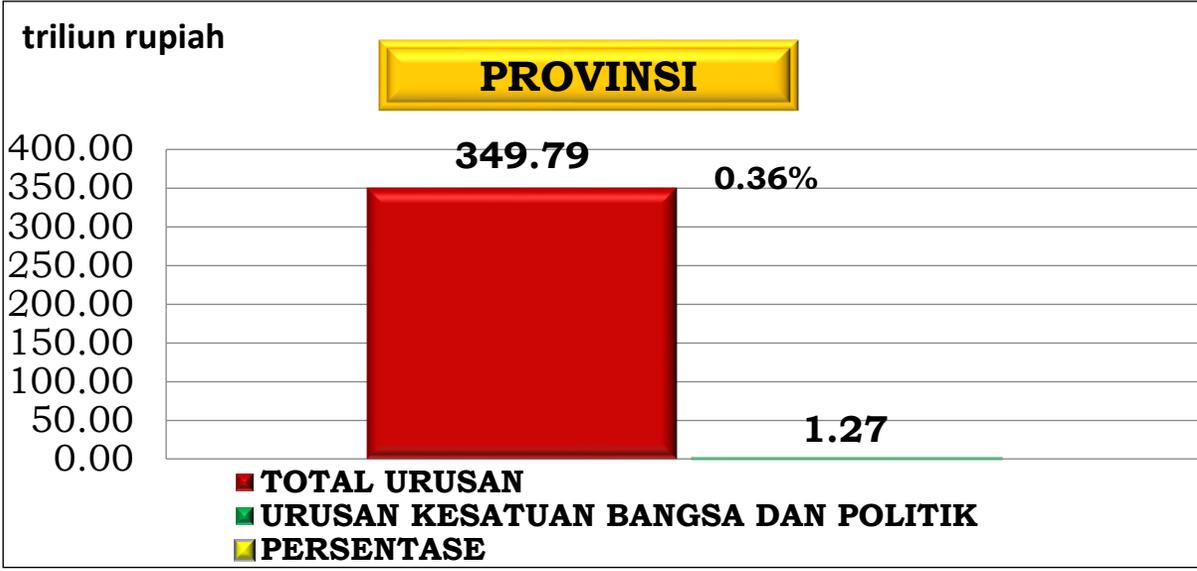
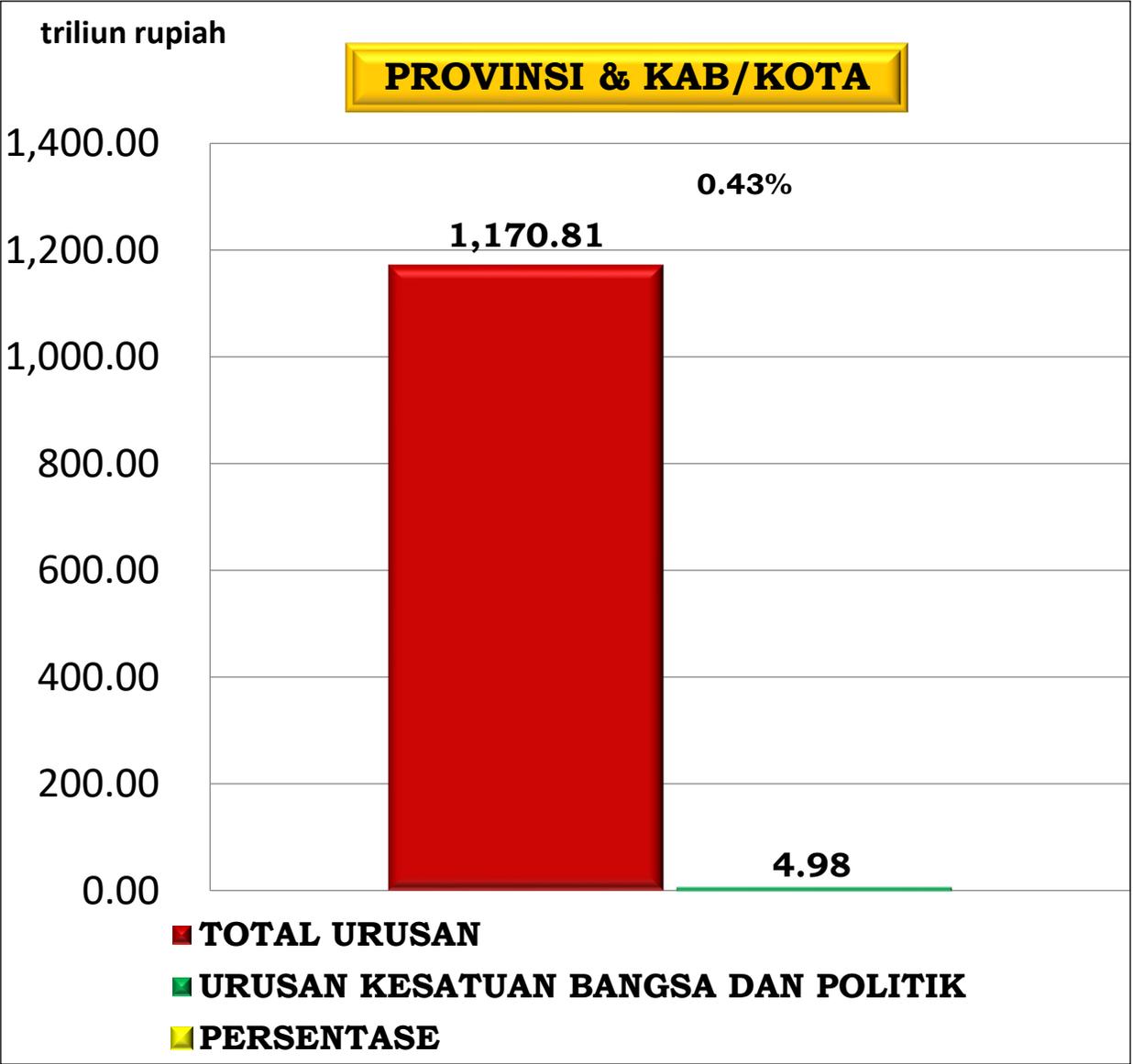
# **Krisis LSM: Trend**

- **LSM berjamur namun peran semakin merosot**
- **Disrupsi di semua sektor termasuk gerakan civil society**
- **Jaringan Kerja Merosot : Dari Insttusionalisasi ke Personal**
- **Merosotnya Program dan Dana dari Donor LN**
- **Lemahnya Philantropis Lokal Untuk Mendanai Sektor LSM**
- **Bring The State Back In**
- **Krisis Keuangan LSM**

# Model Pendanaan LSM

- **1. Iuran Anggota**
- **2. FFA → LSM**
- **2. FFA → Konsorsium → LSM**
- **3. CSR → LSM → Masyarakat**
- **4. Pemda → LSM**
- **5. APBD: Swakelola Tipe III**
- **6 Dana Abadi (Endowment Fund untuk LSM ) ?**

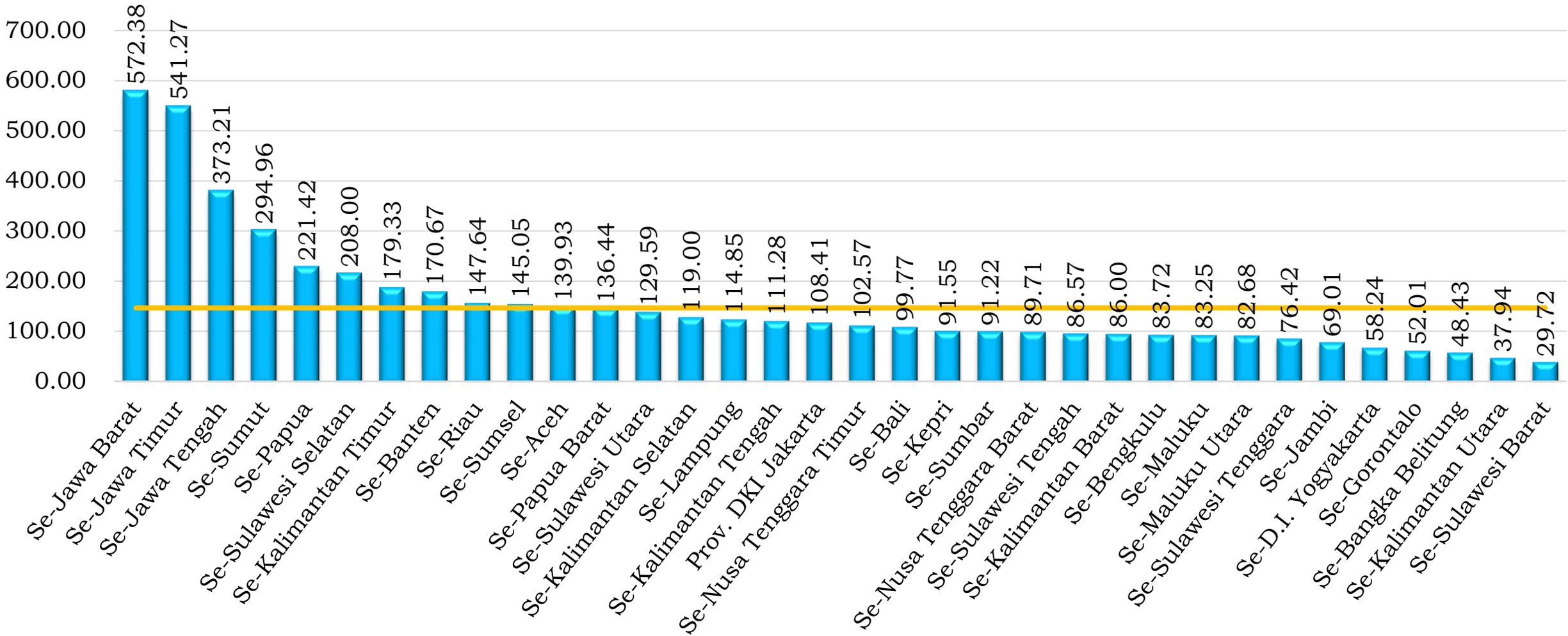
Model Pendanaan LSM 4: Pemda → LSM  
**ANGGARAN URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**APBD PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TA 2022**



Model Pendanaan LSM 4: Pemda → LSM  
**ANGGARAN URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**APBD PROVINSI & KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI TA 2022**

miliar rupiah

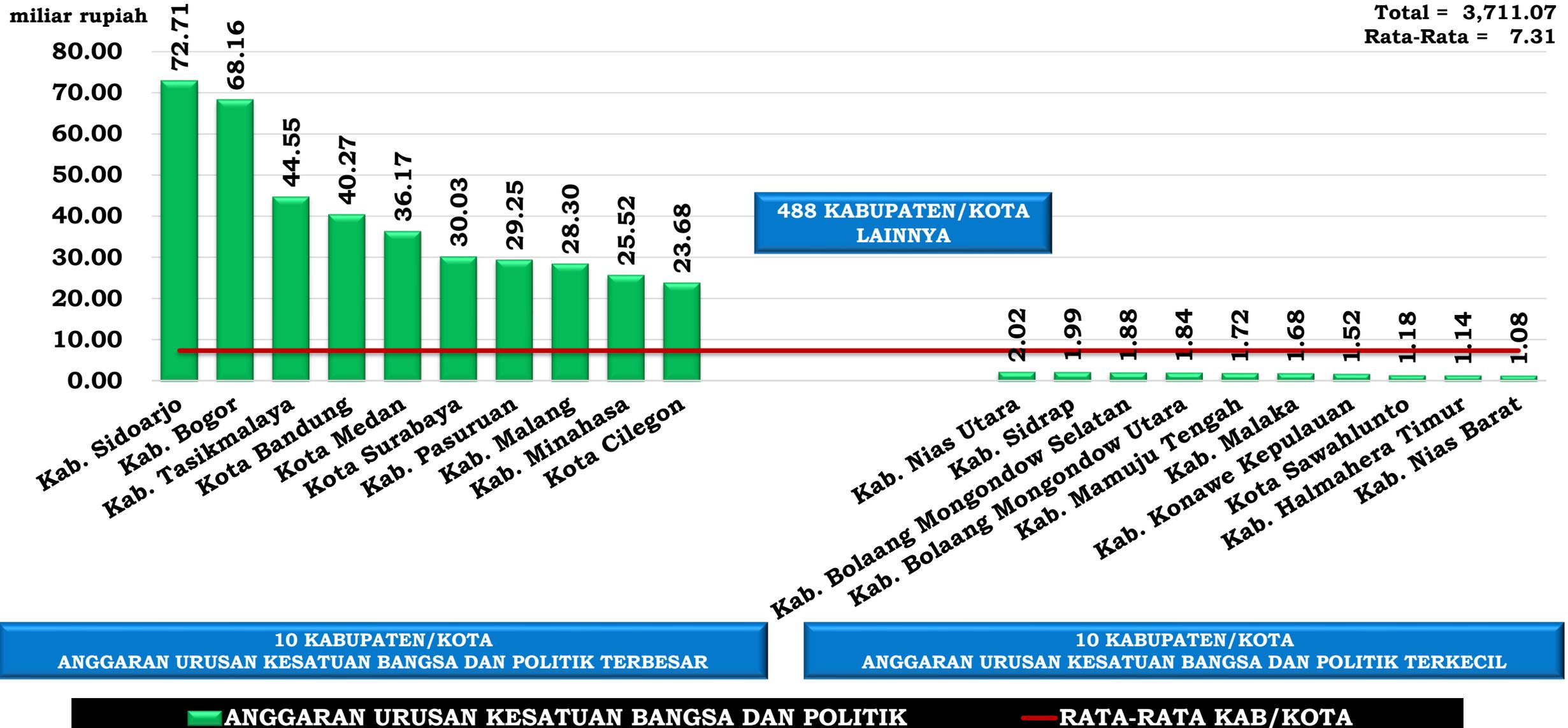
Rata-Rata = 146.54



**ANGGARAN URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**Rata-rata**

Model Pendanaan LSM 4: Pemda → LSM  
**ANGGARAN URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**APBD KABUPATEN/KOTA TA 2022**





**Dasar** : 1) Keppres 7/2020 tentang Percepatan Percepatan Penanganan Covid-19

**Arahan**: Pemda (Gubernur dan Bupati/Walikota dapat melakukan kerjasama dengan Ormas dan LSM melalui sekema Swakelola Tipe III sesuai Perpres 18/2016 tentang Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)

**Barang/jasa** yang dapat disediakan oleh Ormas termasuk LSM melalui Swakelola Tipe III dapat berupa:

- a, Penyelenggaraan **sosialisasi/penyuluhan** mengenai pencegahan dan penanggulangan Covid-19.
- b. **Sensus, survei, pemrosesan/pengolahan data**, perumusan kebijakan publik, dan pengujian laboratorium.
- c. Pengembangan **sistem, aplikasi, tata kelola, atau standar mutu kesehatan** tertentu.
- d. Barang/jasa yang diberikan oleh organisasi kemasyarakatan, atau masyarakat, contoh: **masker, hand sanitizer, disinfektan, dan lain sebagainya.**
- e. Barang/jasa yang pelaksanaan pengadaannya memerlukan partisipasi masyarakat, contoh: **pembuatan media sosialisasi Covid-19**, kondisi terkini penanganan Covid-19, dan lain sebagainya.
- f. Barang/jasa lainnya dalam **rangka penanganan Covid-19** di daerah.



## LANGKAH-LANGKAH/STRATEGI PERCEPATAN PENYERAPAN PENDAPATAN & BELANJA DAERAH

### Pemerintah Daerah agar:

### BELANJA DAERAH

#### Keterlibatan Masyarakat



Melakukan keterlibatan masyarakat dalam bentuk pemberdayaan yang dapat menggerakkan perekonomian daerah khususnya home industry (sektor UMKM) serta Merevitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi pedesaan, pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta dukungan infrastruktur pedesaan guna meningkatkan daya beli masyarakat;

#### Evaluasi Kontrak



Meninjau ulang pelaksanaan kontrak kerja kegiatan yang berpotensi tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran serta menunda pelaksanaan kontrak kerja yang tidak memiliki dampak langsung terhadap pemulihan ekonomi

#### Reformulasi Program & Kegiatan



Melakukan reformulasi program dan kegiatan dengan dukungan alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung pemulihan ekonomi di daerah, antara lain:

- Melaksanakan program padat karya tunai dengan mengutamakan sumber daya lokal dan tenaga kerja lokal;
- Memberikan stimulus/subsidi kepada pelaku UMKM dan koperasi melalui bank milik pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan produk unggulan daerah antara lain dengan pemberian bantuan modal kerja, penguatan modal usaha, pemberian pinjaman lunak, dan pemutihan hutang pinjaman;
- Melaksanakan perluasan target/sasaran pelaksanaan operasi pasar; dan
- Melaksanakan perluasan target/sasaran penerima bantuan sosial.

#### Rekapitulasi Anggaran



Merekapitulasi anggaran pada program dan kegiatan yang berpotensi tidak terserap dan/atau diindikasikan memiliki daya serap rendah serta mendorong perangkat daerah untuk melakukan langkah-langkah strategis percepatan pelaksanaan kegiatan diiringi dengan penyediaan reward dan punishment sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

#### Peran APIP



Mendorong peran serta APIP dalam memberikan asistensi dan pengawasan dlm penyelenggaraan program dan kegiatan pemerintah daerah.

# **Pendanaan Negara Untuk LSM ??**

- **Dasar Regulasi: Perpres (non political process) atau UU dalam bingkai proses politik (seperti UU Parpol).**
- **Sumber Pendanaan: APBN dan APBD (selective or mandatory ?)**
- **Mekanisme Penyaluran: NHPD ?**
- **Kriteria Penerima dan Daerah/Sektor Sasaran**
- **Kebijakan : RPJP- N, RPJM dan RKPD**
- **Oversight Committe**



# TERIMAKASIH

**Dr. Kastorius Sinaga – Staf Khusus  
Mendagri Bidang Politiuk dan Media**

**email:**

**[kastorius.sinaga@kemendagri.go.id](mailto:kastorius.sinaga@kemendagri.go.id)**

**HP/WA : 0811810879**



**[www.kemendagri.go.id](http://www.kemendagri.go.id)**



**Kemendagri\_RI**



**kemendagri**



**kemendagri**